



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

INFO LEGISLASI

11 MEI 2022



**Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataaan**



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan RUU usul inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk membuat draf NA dan RUU perubahan UU tersebut. Saat ini NA dan RUU tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sedang dalam tahap penyusunan di Pusat PUU BK DPR RI. Beberapa substansi dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini karena usia UU ini sudah mencapai lebih dari 10 tahun. Sehingga perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi perubahan antara lain :

- a. Pengembangan pariwisata wajib mempertahankan kekayaan budaya dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, serta memelihara kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan;**
- b. Perlu kebijakan afirmatif terhadap pengembangan wisata sejarah sebagai pintu masuk untuk memulihkan/mewariskan ke generasi selanjutnya, dan pengembangan wisata religi;**
- c. RUU tentang Kepariwisata perlu mengembangkan paradigma terkait keseimbangan antara keterlibatan UMKM dengan pertumbuhan investasi, dan keseimbangan pertumbuhan ekonomi;**
- d. Destinasi wisata belum dapat memberikan peningkatan pendapatan daerah, tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat sekitar;**
- dan e. Belum adanya kejelasan hubungan antar Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata antar daerah.**



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

**SAHABAT PUU DAPAT MENGAkses INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUU DENGAN
SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO LEGISLASI

11 MEI 2022



Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Penyadapan



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr

RUU tentang Penyadapan merupakan RUU usul inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk membuat draf NA dan RUU tersebut. Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan, sedangkan pengaturan yang ada terkait penyadapan mengatur kewenangan dan mekanisme yang berbeda-beda terhadap pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya undang-undang yang mengatur terkait penyadapan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM.

Adapun konsep draf NA dan RUU tentang Penyadapan telah disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI dengan memuat beberapa isu penting terkait dengan urgensi RUU tersebut antara lain: a. pengaturan mengenai definisi penyadapan; b. ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum; c. permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme; d. mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak; dan e. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan masa penyimpanan 2 (dua) tahun.



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

**SAHABAT PUU DAPAT MENGAkses INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUU DENGAN
SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

**BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI,
DAN PEMBANGUNAN**

INFO LEGISLASI

11 MEI 2022

“

**RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan**

”



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan RUU usul inisiatif DPR. Badan Keahlian (BK) DPR RI diminta untuk membuat draf NA dan RUU perubahan UU tersebut. Saat ini NA dan RUU perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang dalam tahap penyusunan di Pusat PUU BK DPR RI.

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga terhadap UU LLAJ perlu dilakukan perubahan.

Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunannya terkait dengan:

a. Lingkup pengaturan UU tentang LLAJ yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi; b. Belum diaturnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebagai salah satu moda transportasi umum; c. Dana preservasi jalan yang belum dapat diimplementasikan secara efektif; dan d. Pelanggaran terhadap operasional kendaraan terkait (*Over Dimension Over Loading/ODOL*) dan perumusan kembali ketentuan sanksi pidana dan denda ODOL lebih tegas.



[pusatpuubk_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk_dpr](#)

**SAHABAT PUU DAPAT MENGAkses INFO
LEGISLASI DI LAMAN WEBSITE PUU DENGAN
SCAN BARCODE DI BAWAH INI YA.**



pusatpuubk_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk_dpr